

Community Based Natural Resources Management (CBNRM) di Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang

Fransisca Emilia^{1,*}, Boedi Hendarto² dan Tukiman Taruna³

¹Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

²Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

³UNICEF

* fransiscaemilia@yahoo.com

ABSTRACT

Desa Keseneng merupakan salah satu desa yang terletak pada DAS Bodri hulu di lereng Gunung Ungaran. Desa ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan lanskap pegunungan yang luar biasa. Meskipun demikian, kekayaan alam tersebut tidak membuat Desa Keseneng sejahtera, sebaliknya termasuk dalam kategori desa tertinggal. Sejak tahun 2010, Keseneng melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan *community based* melalui program desa wisata. Pendekatan *Community Based Natural Resources Management* (CBNRM) tersebut membawa perubahan positif baik pada aspek lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Keseneng pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta kendala yang dihadapi dalam CBNRM. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat atau memahami CBNRM di Desa Keseneng. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap aspek pengelolaan dilakukan oleh masyarakat dengan binaan pemda dan dampingan LSM. Hasilnya, pendekatan *community based* dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan baik pada aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Keberhasilan CBNRM di Desa Keseneng layak diapresiasi dan direplikasi pada desa-desa lain di wilayah DAS Bodri hulu.

Keyword : pengelolaan, sumber daya alam, community based, perencanaan, berkelanjutan

1. PENGANTAR

Desa Keseneng merupakan salah satu desa yang terletak di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri di lereng Gunung Ungaran pada ketinggian sekitar 700 meter. Secara administratif, desa ini termasuk dalam Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal. Jarak dari pusat pemerintahan yaitu kecamatan 6,5 km dan dari kabupaten mencapai 48 km.

Posisi Keseneng yang berada di pegunungan membuat Desa tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) dan lanskap yang luar biasa. Enam buah sungai mengalir melalui desa tersebut dan sembilan air terjun berbeda karakter menghiasi sungai-sungainya. Lahan dengan topografi yang curam dan berbukit-bukit umumnya diusahakan sebagai hutan rakyat, dan berbagai satwa liar seperti macan tutul, kijang, monyet, dan aneka jenis burung masih sering ditemui.

Kaya akan sumber daya alam tidak membuat Desa Keseneng sejahtera. Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan dan umumnya desa-desa yang berada di hulu DAS, Keseneng kurang dalam sarana dan prasarana umum, baik sarana kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Akibatnya, Desa Keseneng menjadi salah satu desa yang masuk kategori desa tertinggal. Hampir 70% warga bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan kepemilikan lahan yang sempit.

Sejak tahun 2010, Desa Keseneng mulai mengelola sumber daya alam yang dimilikinya melalui pengembangan desa wisata dengan produk unggulan Curug Tujuh Bidadari. Dengan binaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Semarang serta dampingan LSM Salunding, Keseneng mulai berbenah dan mengalami kemajuan. Pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan *community based* yang dikembangkan di Keseneng membawa perubahan mendasar baik pada aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Community Based Natural Resources Management (CBNRM) merupakan sebuah pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam dari model konvensional dan pendekatan top down menuju partisipasi masyarakat (Isyaku, Chindo & Ibrahim, 2011). Pendekatan ini merupakan proses desentralisasi yang bertujuan memberikan wewenang pengambilan keputusan hak untuk mengontrol sumber daya alam kepada institusi akar rumput (Nhantumbo, Norfolk & Pereira, 2003).

Child & Lyman (2005) mendefinisikan CBNRM sebagai sebuah proses dimana *landholder* memperoleh akses dan menggunakan haknya atas sumber daya alam; perencanaan yang kolaboratif dan transparan dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam; serta memperoleh keuntungan finansial maupun keuntungan lainnya dari keterlibatan mereka. *Landholder* dalam pengertian ini,

termasuk milik pribadi, swasta, dan komunal. Pengertian tersebut menyiratkan keharusan transfer ekonomi dan politik, sumberdaya bernilai tinggi seperti kehidupan liar atau kehutanan, dan perubahan dari terpusat menjadi kontrol masyarakat.

Senad dengan pendapat tersebut, Wahyudin (2004) menerangkan bahwa CBNRM merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat, dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan bersifat multidimensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2. METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat dan memahami CBNRM di Desa Keseneng selama Bulan Juli dan Agustus tahun 2012. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat Desa Keseneng yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam maupun yang memperoleh manfaat secara langsung, LSM pendamping, dan pemda. Data sekunder diperoleh dari data desa, instansi terkait, artikel jurnal, tesis, buku-buku teks, dan internet.

2.2 Analisis

Analisis Data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara garis besar analisis dilakukan dalam tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan terus menerus, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2009). Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini meliputi gambaran CBNRM di Desa Keseneng dan empat aspek pengelolaan, yaitu perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Asdak, 2010).

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Perencanaan pengelolaan sumber daya alam

Pendekatan *Community based* dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng berawal dari konflik pemanfaatan salah satu sumber daya alam yang berada di perbatasan desa dengan Desa Gondang, Kabupaten Kendal, yaitu goa dan air terjun Paleburgongso. Kedua SDA tersebut diklaim oleh kedua kabupaten sebagai obyek wisata pada masing-masing kabupaten, sondang

Pada awal tahun 2010, Desa Gondang meresmikan bumi perkemahan dan tempat parkir dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kendal. Kejadian tersebut memicu kecemburuan warga Desa Keseneng dan suasana memanas. Warga Desa Keseneng melakukan protes dengan menebangi bambu untuk menghalangi akses menuju areal wisata. Hubungan antara kedua desa semakin memanas dan tidak harmonis.

Kepala Desa Keseneng mengkomunikasikan perselisihan tersebut kepada pihak kecamatan yang ditindaklanjuti oleh pamong budaya dan tim kreatif dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mensurvey obyek wisata potensial. Setelah survey dan berdialog dengan pihak desa, diputuskan untuk menghentikan perselisihan dan mengembangkan obyek wisata baru sebagai tandingan.

Warga secara swadaya bergotong royong mempersiapkan lokasi wisata dan secara resmi membuka Curug Tujuh Bidadari (C7B) sebagai obyek wisata pada tanggal 20 Mei 2010. Pada awalnya pengembangan wisata masih berjalan sekadarnya tanpa perencanaan yang memadai.

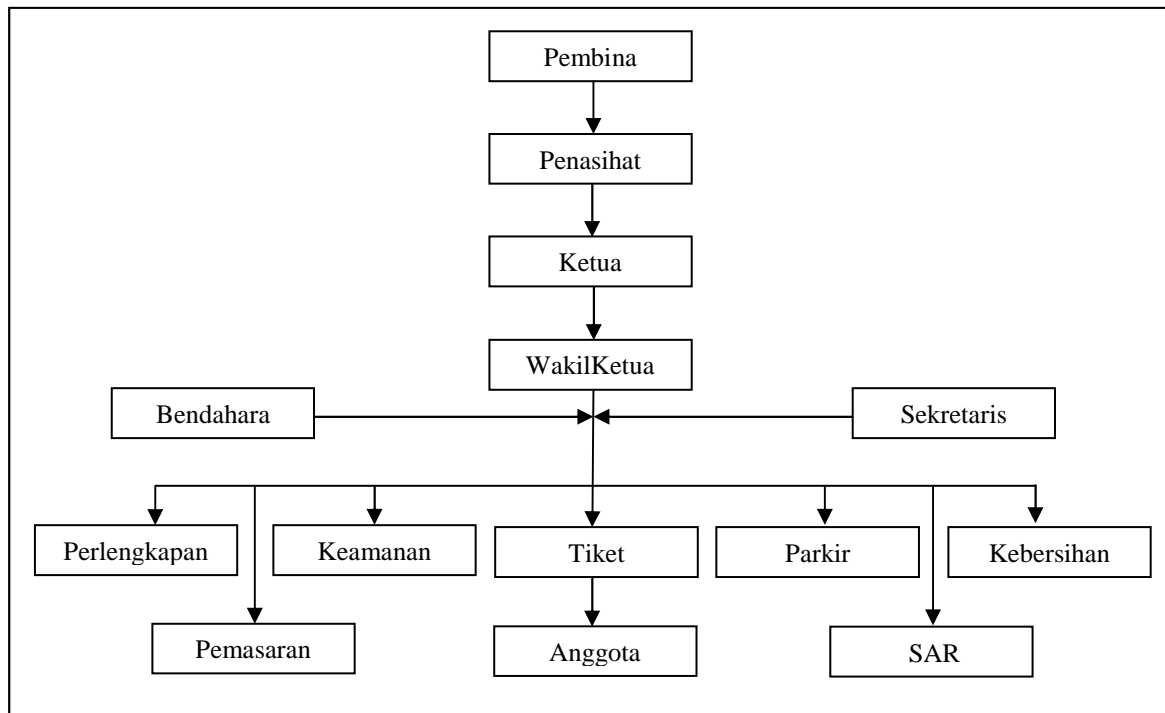
Perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan desa yang sebenarnya baru dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 dengan fasilitasi LSM Salunding. Warga desa berkumpul mengadakan rembug warga dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rembug warga dilakukan oleh perwakilan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, perangkat desa, dan Dewan Perwakilan Desa.

Kegiatan perencanaan desa tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) membangun impian atau visi desa; (2) mengidentifikasi dan memetakan potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang sudah ada; (3) mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang menjadi kendala pengembangan desa; (4) menyusun alternatif program untuk memecahkan masalah menggunakan potensi yang dimiliki; (5) menyusun kebijakan pembangunan yang terdiri dari kerangka logis pengembangan desa dan kerangka logis pengembangan Desa Wisata Keseneng.

Dari kegiatan perencanaan desa tersebut disepakati untuk mengembangkan Desa Keseneng sebagai desa wisata dengan visi " Menuju Desa Wisata Keseneng yang makmur dan mandiri". Adapun visinya adalah; (1) Meningkatkan sarana dan prasarana bidang wisata; (2) Meningkatkan kualitas SDM untuk mengelola sektor wisata dan pertanian secara mandiri; (3) Membangun aparat desa yang terampil; (4) Membangun desa wisata terpadu dan berkelanjutan; (5) Membuka keterlibatan masyarakat dalam segala aktivitas pemerintah; dan (6) Membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa (Desa Keseneng, 2011).

3.2 Pengorganisasian pengelolaan sumber daya alam

Pengorganisasian pengelolaan sumber daya alam direncanakan berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun hingga saat ini masih menggunakan organisasi pelaksana yang dibentuk pada awal dikembangkannya wisata C7B, yaitu Pokdarwis C7B yang merupakan binaan Disporabudpar Kabupaten Semarang. Adapun struktur organisasinya seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur organisasi pengelola sumber daya alam Desa Keseneng

Organisasi pengelola yang oleh warga sering disebut sebagai panitia tersebut pemilihan personelnnya tidak melalui pemilihan secara demokratis, namun ditunjuk oleh kepala desa yang bertindak sebagai penasihat. Adapun anggotanya terdiri dari perangkat desa dan beberapa tokoh pemuda. Alasan penunjukan tersebut adalah karena pengembangan wisata baru dirintis dan belum menunjukkan hasilnya sehingga dipilih perangkat desa yang bersedia bekerja tanpa dibayar, bahkan sebaliknya harus mengeluarkan dana untuk mendukung pengembangan wisata.

Proses pengorganisasian yang tidak demokratis tersebut pada awalnya tidak menimbulkan masalah, namun setelah wisata berkembang muncul kecemburuan dari sebagian warga yang tidak terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

3.3 Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat melalui desa wisata dilaksanakan bersama-sama oleh semua warga Desa Keseneng. Pada awal persiapan warga bergotong royong membangun tempat parkir selama hampir enam bulan. Biaya awal pembangunan berasal dari pinjaman warga yang kemudian dikembalikan setelah desa wisata memberikan hasil.

Pelaksanaan CBNRM di Desa Keseneng menempatkan masyarakat sebagai tokoh utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Seluruh warga desa berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat memperoleh manfaat finansial dari pengelolaan sumber daya alam, dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan desa. Pada tahun 2011, Desa Keseneng membukukan pemasukan sebesar Rp. 307.883.000. Pendapatan sebesar itu diperoleh dari sumber-sumber seperti tiket masuk, parkir, dan retribusi warung seperti rincian pada tabel 1. Selain pendapatan tersebut, masyarakat yang terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung adalah pekerja harian, pemilik warung, pemilik home stay, dan masyarakat yang lahannya masuk dalam zonasi wisata.

Tabel1. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan SDA di Desa Keseneng (Tahun 2011)

Sumber	Pendapatan
Tiket	252.119.000
Parkir	47.003.000
Retribusi warung	3.045.000

Sewa Gazebo	1.155.000
Toilet	3.650.000
Penitipan helm	486.000
Bagi hasil home stay	100.000
Pre wedding	325.000
JUMLAH	307.883.000

Penerima manfaat ekonomi secara tidak langsung adalah seluruh warga desa melalui sistem bagi hasil dengan prosentase yang disepakati bersama pada saat perencanaan. Prosentase terbesar dimanfaatkan untuk pengembangan wisata, terutama pembangunan infrastruktur. Penerima bagi hasil lainnya adalah untuk pembangunan masjid, kas desa, dan kas dusun yang semuanya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh warga desa. Perincian bagi hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Bagi hasil pengelolaan sumber daya alam

Prosentase (%)	Penerima bagi hasil	Keterangan
35	Pengembangan wisata	Dimanfaatkan sesuai keperluan
20	Upah pekerja	Dibayarkan setiap minggu
10	Kas desa	Dimanfaatkan sesuai keperluan
8	Masjid	Dibayarkan setiap bulan
8	Dana sosial	Dimanfaatkan sesuai keperluan
5	Kesenian	Dimanfaatkan sesuai keperluan
5	Zonasi	Dibayarkan setahun sekali
5	Kesehatan/asuransi	Sesuai keperluan
3	Kas dusun	Dibayarkan setahun sekali
1	Keamanan/Muspika	Sesuai keperluan

Pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, namun juga memberikan manfaat bagi perbaikan lingkungan. Untuk mendanai pembangunan Masjid, semula masyarakat menambang batu di bukit batu dan sungai. Kemudian disepakati untuk menghentikan penambangan, bahkan meminta pencabutan izin tambang yang sudah diberikan oleh bupati.

Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang dikelola untuk wisata tersebut, masyarakat sepakat untuk membagi zonasi desa kedalam zona inti yang berfungsi sebagai kawasan lindung, zona pemanfaatan tradisional, dan zona pemanfaatan ekonomi. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perdes Pengembangan Desa Wisata Keseneng yang hingga saat ini masih berupa draft namun sudah mulai diimplementasikan. Masyarakat juga sepakat untuk menghentikan pengambilan ikan disungai dengan cara menyetrum atau meracun. Pengambilan ikan yang diijinkan hanya dengan cara memancing atau menjaring sehingga ikan-ikan berukuran kecil tetap hidup dan berkembang biak.

Pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan *community based* di Desa Keseneng membuka peluang terhadap akses dana maupun pembangunan sarana prasarana untuk menunjang kemajuan desa. Desa yang pada awalnya merupakan desa tertinggal dan tidak mendapat perhatian pemerintah, kini mulai berbenah dan tersentuh proyek-proyek pembangunan maupun aliran dana pemerintah, diantaranya adalah dana PNPM pariwisata pada tahun 2011 dan 2012, pengaspalan jalan dan pavingisasi, serta pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam.

3.4 Pengawasan pengelolaan sumber daya alam

Setiap bulan, pengurus Pokdarwis C7B mengadakan rapat evaluasi pengelolaan curug. Rapat tersebut hanya melibatkan pengurus, sehingga warga desa secara keseluruhan tidak mengetahui perkembangan pengelolaan sumber daya alam di desa mereka. Laporan terhadap warga hanya disampaikan sekilas dalam rapat tahunan desa saat penyerahan bagi hasil.

Rambu-rambu pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng sebenarnya sudah tertuang dalam peraturan desa wisata. Namun setelah satu tahun penyusunannya, perdes tersebut masih berupa draft. Pemerintah desa enggan mengesahkan perdes tersebut karena menunggu terealisasinya maket pengembangan desa yang terkendala pendanaan.

Kepala desa yang berkedudukan sebagai penasehat masih memegang peranan penting dalam pengawasan, sementara warga desa belum memiliki akses untuk melakukan pengawasan secara langsung.

3.5 Kendala CBNRM

Kendala utama CBNRM di Desa Keseneng adalah karakter warga yang cenderung menginginkan hasil yang serba instan. Kesulitan pendanaan pada awal pengelolaan menyebabkan pengembangan desa wisata berjalan tersendat-sendat dan tidak membuahkan hasil. Pada lain sisi, publikasi di berbagai media cetak dan televisi mengundang pihak luar untuk berinvestasi di Desa Keseneng. Banyak investor yang berminat membeli dan menyewa tanah di sekitar curug dengan harga tinggi. Beberapa warga hampir tergiur dengan tawaran tersebut. Namun, melalui pertemuan-pertemuan

dengan warga, Disporabudpar Kabupaten Semarang selalu menghimbau agar warga desa tidak menjual sejenkal tanah pun. Dengan demikian warga tetap menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Faktor lain yang menghambat adalah adanya konflik horisontal antar warga. Pembentukan pengurus yang tidak demokratis dan masih terbatasnya jumlah warga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan kecemburuan dan perselisihan. Beberapa nara sumber mengungkapkan kecurigaannya kepada pengurus karena tidak ada transparansi keuangan. Ada anggapan bahwa pengurus yang sebagian besar merupakan perangkat desa, mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun dengan adanya bagi hasil yang diberikan pada setiap dusun dalam rapat tahunan desa, kecurigaan mulai berkurang.

Pengembangan desa wisata juga terkendala akses dana dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Program-program yang sudah tertuang dalam RPJMDes sebagian belum dapat direalisasikan karena pemerintah daerah belum mengucurkan dana atau proyek sesuai usulan dalam RPJMDes tersebut.

4. KESIMPULAN

Community Based Natural Resources Management di Desa Keseneng merupakan pendekatan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat melalui wisata alam. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap aspek pengelolaan, sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Pihak luar, yaitu Disporabudpar Kabupaten Semarang dan LSM Salunding berperan sebagai pendamping dan fasilitator yang membantu pada pengembangan sumber daya manusia.

Pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga, wewenang pengambilan keputusan, akses terhadap pendanaan, serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

5. REFERENSI

- Asdak, C., 2010, Hidrologi dan pengelolaan DAS, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Child, D dan MW. Lyman, 2005, 'Introduction', in B. Child & MW Lyman (ed), *Natural Resources as Community assets*, Sand County Foundation, Wisconsin.
- Desa Keseneng, 2011, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2015, Jawa Tengah.
- Isyaku, U., M. Chindoda dan M. Ibrahim, 2011, *Assesing Community-based Natural Resources Management at Lake Naivasha, Kenya*, *Environment and Natural Resources Research*, Vol. 1, No. 1, pp. 106-116.
- Miles, B.M., dan A.M. Huberman, 2009, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.
- Nhantumbo, I., S. Norfolk dan J. Pereira, 2003, *Community Based Natural Resources Management in Mozambique: A Theoretical or Praktical Strategy for Local Sustainable Development? The Case study of Derre Forest Reserve, Sustainable livelihood in Southern Africa Research Paper 10*, Institute of Development Studies Sussex.
- Wahyudin, W., 2004, 'Community Based Management (CBM)', Makalah disampaikan pada Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICZPM, Integrated Coastal Zone Planning Management), Bogor, 15 September.